

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap keberlakuan lembaga perdamaian melalui upaya mediasi berdasarkan PERMA No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diperoleh kesimpulan, yaitu :

Keberlakuan PERMA No. 2 Tahun 2003 secara yuridis didasarkan pada ketentuan TAP MPR No III/MPR/2000 Pasal 4 dan UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 79 beserta penjelasannya. Kewenangan MA yang diwujudkan dengan dikeluarkannya PERMA ini telah secara hirarkhis sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara sistematis telah ada sikronisasi antara PERMA No. 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan dasar TAP MPR No. III / MPR/2000 Pasal 4, dan UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 79 beserta penjelasannya.

Sedangkan pendekatan sosiologi hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman sebagai salah satu Pengadilan Negeri yang belum melaksanakan PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diketahui bahwa di Pengadilan Negeri Sleman PERMA No.2 Tahun 2003 belum dilaksanakan. Hal ini

karena di dalam PERMA tersebut mensyaratkan pelaksanaannya harus menggunakan mediator yang telah bersertifikat, dan dibutuhkan pula ruangan di pengadilan tempat mediasi yang bersifat rahasia, sementara di Pengadilan Negeri Sleman belum terpenuhi dua syarat itu. Sebenarnya apapun alternatif yang ditawarkan, masyarakat lebih menghendaki perkara mereka dapat terselesaikan dengan cepat, sederhana, murah, dan tidak menimbulkan konflik baru.

B. Saran

Pemberlakuan lembaga perdamaian melalui mediasi dalam bentuk PERMA karena sifatnya tidak mengikat (tidak mempunyai akibat hukum/ tidak memuat sanksi hukum), tidak begitu berpengaruh dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu hendaknya ditingkatkan pemberlakuannya dengan didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi berupa peraturan perundang-undangan dengan dasar TAP MPR No. III/MPR/ 2000 Pasal 2. Ketentuan tersebut nantinya bersifat mengikat dan mempunyai akibat/ sanksi hukum yang tegas sehingga tujuan dari lembaga tersebut dapat tercapai

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Harahap M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT.Gramedia, 1988
- Harahap M. Yahya, *Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar hukum Eksekusi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 1999
- Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995
- Panggabean Henry P, *Penyalahgunaan Keadaan sebagai alasan (baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1992
- Panggabean Henry P, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2001
- Saleh K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata (RBg/ HIR)*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) Jakarta, 1986
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Penerbit CV.Rajawali Jakarta 1985
- Sujud Margono, *APS dan Arbitrase*, Penerbit Ghalia Jakarta 2000

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- TAP MPR No.III Tahun 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI.
- TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-

Lembaga Tinggi Negara
Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 No 8
Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
 Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 No 9
Undang-Undang No 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan
 Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Umum
Undang-Undang no 30 tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
 Sengketa.

Pustaka dan Dokumen Pendukung

SEMA No 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat
 Pertama Menerapkan Lembaga Damai
PERMA No 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Harian Kompas edisi 5 September 2003, Didi Irawadi Syamsudin, Mediasi
 sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Majalah Varia Peradilan, Tahun VII, No 82 Juli 1992
Peter Salim. Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Edisi
 Pertama, Penerbit Modern English Press, Jakarta 1991.
Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia Fockema Andreae Penerbit Bina
 Cipta 1983.
Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan Buku II cetakan
 ke-3 MARI 1998
Rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua MARI 1993



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 2 TAHUN 2003

Tentang

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan
 - b. bahwa mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi;
 - c. bahwa institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif);
 - d. bahwa Surat Edaran No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg) belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan;
 - e. bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara

mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan tingkat pertama;

- f. bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

Mengingat

1. Pasal 28 D Undang-undang Dasar 1945.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227.
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 74 tahun 1970.
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 73 tahun 1985;
5. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Nomor 20 tahun 1986.
6. Undang-undang No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000.

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Akta perdamaian adalah dokumen kesepakatan yang merupakan hasil proses mediasi;
2. Daftar Mediator adalah sebuah dokumen yang memuat nama-nama mediator di lingkungan sebuah pengadilan yang ditetapkan oleh Ketua pengadilan;
3. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa dan mengadili perkara;
4. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya;
5. Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa;
6. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
7. Para pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan tingkat pertama untuk memperoleh penyelesaian;
8. Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini;
9. Sengketa publik adalah sengketa-sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan dan perburuhan yang melibatkan kepentingan banyak buruh;

10. Sertifikat Mediator adalah dokumen yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
11. Proses mediasi terbuka untuk umum adalah anggota-anggota masyarakat dapat hadir atau mengamati, atau masyarakat dapat mengakses informasi yang muncul dalam proses mediasi.

Pasal 2

- (1) Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya mediator wajib menaati kode etika mediator.

BAB II

Tahap Pra Mediasi

Pasal 3

- (1) Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar lebih dahulu menempuh mediasi.
- (2) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara itu untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (3) Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.
- (4) Dalam hal para pihak memberikan kuasa kepada kuasa hukum, setiap keputusan yang diambil oleh kuasa hukum wajib memperoleh persetujuan tertulis dari para pihak.

Pasal 4

- (1) Dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak dan atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan.
- (2) Jika dalam waktu satu hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator di dalam atau di luar daftar pengadilan, para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama.
- (3) Jika dalam satu hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dari daftar mediator dengan penetapan.
- (4) Hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Proses mediasi yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja.
- (2) Setelah waktu tiga puluh hari kerja terpenuhi para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan.
- (3) Jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian.
- (4) Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan penetapannya sebagai suatu akta perdamaian, pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.

Pasal 6

- (1) Mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator.
- (2) Setiap pengadilan memiliki sekurang-kurangnya dua orang mediator.
- (3) Setiap pengadilan wajib memiliki daftar mediator beserta riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator dan mengevaluasi daftar tersebut setiap tahun.

Pasal 7

Mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB III

Tahap Mediasi

Pasal 8

Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak.

Pasal 9

- (1) Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi.
- (2) Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya.
- (3) Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
- (4) Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.

- (5) Dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh dua hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator.

Pasal 10

- (1) Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam penyelesaian perbedaan.
- (2) Semua biaya jasa seorang ahli atau lebih ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Pasal 11

- (1) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.
- (3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.
- (4) Para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan telah dicapainya kesepakatan.
- (5) Hakim dapat mengukuhkan kesepakatan sebagai suatu akta perdamaian.

Pasal 12

- (1) Jika dalam waktu seperti yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (5) mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

- (2) Segera setelah diterima pemberitahuan itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.
- (2) Fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.
- (3) Mediator tidak dapat diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.
- (2) Proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum.

BAB IV

Tempat dan Biaya

Pasal 15

- (1) Mediasi dapat diselenggarakan di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama atau di tempat lain yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya.
- (3) Jika para pihak memilih penyelenggaraan mediasi di tempat lain, pembiayaan dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.
- (4) Penggunaan mediator hakim tidak dipungut biaya.
- (5) Biaya mediator bukan hakim ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan kecuali terhadap para pihak yang tidak mampu.

BAB V

Lain-Lain

Pasal 16

Apabila dipandang perlu, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, selain dipergunakan dalam lingkungan peradilan umum dapat juga diterapkan untuk lingkungan badan peradilan lainnya

BAB VI

Penutup

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks pasal 130 HIR/ 154 RBg) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 September 2003

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI



BAGIR MANAN